

PROBLEMATIKA KUTIPAN AKTA NIKAH PALSU DI KECAMATAN PLOSO KABUPATEN JOMBANG

Abdul Basit Misbachul Fitri¹

Abstract: One the implementation of law number 1 of 1974 about marriage, is recording a marriage certificate. The phenomenon shows that there are many fake marriage certificates, however. This article discusses marriage process and marriage certificate forgery quote. This action is done through pander (registrar quote of fake marriage certificate), and in ordering it, the applicants call or come to the pander. This article concludes that the cause of the marriage certificate forgery are as mind factors, such as (1) illegal polygamy, (2) the regulations of prohibiting marriage for the military and police members who are still in education, (3) strict regulations of stating full reason for civil servants who want to polygamy. Another factors such as (1) the lack of public education, (2) the lack of awareness and dissemination of the recording of marriage legal, (3) the public protection against the applicants when the inspection was carried out, (4) the lack of public moral, (5) the eloping done by unmarried couples.

Keywords: marriage, marriage certificate, legal implications

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ajaran Nabi Muhammad Saw yang dianjurkan bagi seseorang yang sudah mampu, baik lahir maupun

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Krempeyang Nganjuk.

batin. Ikatan ini begitu mulia sehingga di dalam QS. al-Nisa: 21 disebut sebagai *mitsâqon galîzhan*. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²

Sebuah ikatan pernikahan memerlukan legalitas dan catatan resmi yang berfungsi sebagai penguat ikatan. Oleh karena Indonesia berada di bawah pemerintahan yang berdasarkan hukum, maka dengan menggunakan dasar *al-mashlahah al-mursalah*, dengan sengaja pemerintah membuat catatan sebagai alat bukti resmi yang tertulis pada instansi yang berwenang mengurus masalah ini, yaitu Departemen Agama yang dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan berada di bawah naungan pemerintah megara Indonesia.

Alat bukti resmi itu disebut sebagai akta nikah yang didokumentasikan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dan disimpan di Pengadilan Agama (PA) yang telah diregistrasi sesuai dengan nomor registrasi Departemen Agama kabupaten/kota. Setelah pemberlakuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Pada Pasal 5 Ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.³

Bagi masyarakat muslim, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA kecamatan, sedangkan bagi masyarakat non-muslim atau perkawinan silang antara masyarakat muslim dengan non-muslim dicatat oleh PPN di Kantor Catatan Sipil. Akta perkawinan dibuat rangkap 2 (dua). Helai pertama disimpan oleh PPN, helai kedua disimpan pada Panitera PA dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada. Kepada suami istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.⁴ Kutipan akta nikah tersebut dicetak dalam dua warna, yang berwarna cokelat untuk suami dan warna hijau untuk istri.

Pencatatan akta nikah dan kutipan akta nikah merupakan realisasi dari pelaksanaan UU Perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia, yaitu Bab II Pasal 5 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi

² Bab II Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Ibid, Bab IV Pasal 14.

⁴ Baca Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32/1954.

Pada Pasal 6 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN. Pada Pasal 6 Ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak memiliki kekuatan hukum.⁵

Namun fakta yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Kutipan akta nikah bisa dipalsukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Tindakan melanggar hukum ini dilakukan karena berbagai motif, sebagaimana yang terjadi di wilayah kecamatan Ploso kabupaten Jombang.

Kasus akta nikah palsu di daerah ini bukan persoalan baru, tetapi sejak dulu sudah terjadi dan tidak tabu lagi jika dibahas. Namun akhir-akhir ini marak terjadi kasus pemalsuan kutipan nikah di tengah-tengah masyarakat. Korban dari praktik ini adalah KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan Departemen Agama Kabupaten Jombang.

Artikel ini akan menelaah dengan cermat dan teliti tentang problematika proses nikah di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Studi kasus tentang kutipan akta nikah palsu ini disertai dengan beberapa faktor penyebab terjadinya kutipan akta nikah palsu, termasuk juga proses memperoleh kutipan akta nikah palsu tersebut.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *qualitative research*, yaitu suatu proses *interpretative understanding*, mengingat memahaminya sangat diperlukan proses penghayatan (*verstehen*). Sumber data penelitian ini berasal dari pegawai KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, pelaku pencatat kutipan akta nikah palsu, pemohon kutipan akta nikah palsu, dokumen dan buku-buku (*literature*) yang mendukung pembahasan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, yaitu melihat atau mengamati secara langsung tentang

⁵ Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

proses transaksi mendapatkan kutipan akta nikah palsu. Kedua menggunakan wawancara, yaitu dengan cara bertanya kepada Pegawai KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, oknum pencatat atau pembuat kutipan akta nikah palsu dan pemohon kutipan akta nikah palsu. Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengambil data dari KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Di samping itu penelitian ini juga menggunakan teknik kajian literatur, yaitu dengan cara menelusuri atau merecover buku-buku dan tulisan yang dapat mendukung bagi pembahasan penelitian.

Pada tahap teknik analisis data, penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian tentang problematika proses nikah bawah tangan di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, dilihat dari segi faktor penyebab terjadinya kutipan akta nikah palsu, proses memperoleh kutipan akta nikah palsu. Data tersebut selanjutnya akan dianalisis dari segi relevansinya, dilihat dari segi keabsahan hukum tentang pencatatan nikah secara prosedural.

Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pendirian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dimulai sejak awal berdirinya Negara Indonesia, di bawah naungan Departemen Agama. KUA Kecamatan Ploso memiliki bangunan permanen pada tahun 1911. Hal ini dapat dibuktikan melalui nomor registrasi yang tercatat di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.⁶

Letak geografis KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang berada di Jalan Raya Ploso Babat No. 234 Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, tepatnya 200 meter sebelah utara kantor Kecamatan Ploso. Jika diukur dengan batas desa, berjarak 4 km dengan desa Pandan Blole dari arah Utara, berjarak 5 km dengan desa Kebon Agung

⁶ Daftar Laporan Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2005.

dari arah Barat, berjarak 5 km dengan desa Losari dari arah Selatan dan berjarak 6 km dengan desa Kedung Dowo dari arah Timur.

Jika diukur dari kantor kecamatan lain, berbatasan dengan kecamatan Planndan di sebelah barat, dengan kecamatan Kabuh di sebelah utara, dengan kecamatan Kudu di sebelah timur dan dengan kecamatan Tembelang di sebelah selatan. Kedudukan KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang sebagai tempat pendaftaran pencatatan nikah bagi penduduk kecamatan Ploso berada di bawah naungan Departemen Agama Kabupaten Jombang.⁷

Struktur kepegawaian di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang tahun 2004-2007 terdiri dari Ilham Rohim (kepala KUA/PPN), Hasanuddin (wakil kepala KUA/Penais), Zainul Arifin (Penghulu) dan Nanik Suaibah (kepala TU). Keadaan penduduk Kecamatan Ploso mayoritas beragama Islam dan mayoritas bekerja sebagai petani. Pendidikan masyarakat Kecamatan Ploso rata-rata lulusan SD sebanyak 55%, SMP 25%, SLTA 15 % dan sarjana 5 %.⁸

Data terjadinya nikah, talak dan rujuk wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang tahun 2004.⁹

Desa/Kelurahan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1. Ploso	3	1	-	-	9	4	2	5	1	1	6	2
2. Jati Gedong	1	1	-	-	4	6	2	3	2	2	4	1
3. Dadi Tunggal	-	1	-	-	1	3	-	-	1	-	1	-
4. Gedong Ombo	-	-	-	-	1	5	2	1	1	-	5	-
5. Jati Banjar	3	-	-	-	6	3	1	1	4	-	9	1
6. Pager Tanjung	3	-	-	-	2	7	2	3	3	3	3	-
7. Kedung Dowo	-	-	-	-	5	7	4	-	2	-	1	-
8. Pandan Blole	1	-	-	-	1	1	1	1	3	-	6	1
9. Losari	7	3	-	-	6	7	3	4	3	1	9	-
10. Bawangan	2	2	-	-	2	2	1	-	3	4	2	-
11. Kebon Agung	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	1	1
12. Rejo Agung	-	4	-	-	8	5	1	1	8	1	6	2
13. Tanggung Kramat	1	1	-	-	8	5	1	3	3	1	4	-
Jumlah	28	13			54	57	21	23	36	13	57	8

⁷ Papan nama KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.

⁸ Grafik kepadatan penduduk di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2005.

⁹ Data jumlah nikah, talak dan rujuk KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2004.

Data kejadian nikah pada bulan Maret 2005 terdaftar 4 pasang calon pengantin, bulan April terdaftar 14 pasang calon pengantin dan bulan Mei terdaftar 64 pasang calon pengantin di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Data tersebut bersumber pada daftar laporan jumlah nikah, talak dan rujuk KUA di setiap bulannya.

B. Kutipan Akta Nikah Palsu

1. Faktor Penyebab Adanya Akta Nikah Palsu

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan responden, yaitu pihak pemesan kutipan akta nikah palsu di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, dengan bukti lembaran kutipan akta nikah palsu. Nama dan tempat kediaman responden sengaja tidak disebutkan demi menjaga *privacy* dari pihak yang bersangkutan.

Kutipan akta nikah ini dianggap asli tetapi palsu karena terbukti pada nomor registrasi. Nama kedua calon pengantin tersebut yang mengaku telah menikah dengan menggunakan kutipan akta nikah palsu atas nama KUA Kecamatan Ploso, ternyata tidak tercatat di KUA Kecamatan Ploso. Peristiwa ini terjadi ketika pihak isteri sah dan keluarga isteri telah mengetahui bahwa suaminya telah melakukan poligami dengan tanpa sepengetahuannya, kemudian isteri sah dan keluarga isteri tersebut melaporkan pada KUA Kecamatan Ploso dengan membawa bukti *foto copy* kutipan akta nikah palsu agar diperiksa kebenaran dari kutipan akta nikah tersebut tercatat atau tidak tercatat, asli tetapi palsu.

Setelah melalui proses pemeriksaan, kutipan akta nikah yang dimiliki suaminya tersebut dengan akta nikah di KUA Kecamatan Ploso, ternyata tidak ditemukan kesesuaian. Berdasarkan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa kutipan akta nikah yang dimiliki suaminya tidak tercatat di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.¹⁰

Pemesan kutipan akta nikah palsu di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang tidak selalu dilakukan penduduk Kecamatan Ploso, namun terkadang dilakukan oleh penduduk kecamatan lain yang berada di wilayah Kabupaten Jombang dengan mengatasnamakan KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Terdapat banyak faktor dominan yang melatarbelakangi adanya kutipan akta nikah

¹⁰ Hasil observasi tanggal 6 Juni 2005.

palsu di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Pertama adalah adanya poligami liar dan tidak sehat. Perbuatan ini dilatarbelakangi oleh poligami yang dilakukan oleh suami tanpa ijin dari pihak isteri pertama dan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan Pengadilan Agama setempat.

Setelah isteri mengetahui poligami yang dilakukan oleh suaminya, lalu menanyakan kepada pegawai KUA setempat tentang keabsahan pernikahan kedua yang dilakukan oleh suaminya tersebut. Dari peristiwa ini akhirnya terungkap adanya kutipan akta nikah palsu atas nama KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, sehingga kutipan akta nikah yang dimiliki oleh kedua pasangan tersebut asli tetapi palsu.

Kedua adalah adanya peraturan yang melarang pernikahan bagi anggota TNI/Polri yang masih dalam tahap pendidikan dan memiliki kekhawatiran akan dipecat oleh atasannya jika diketahui bahwa ternyata sudah menikah. Ketiga adalah adanya peraturan ketat yang memperbolehkan poligami bagi PNS, tetapi harus melalui ijin dari pejabat dan mencantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan ijin untuk beristeri lebih dari satu.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi adanya kutipan akta nikah palsu di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang adalah masih rendahnya pendidikan warga Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Kondisi ini sangat dimungkinkan adanya praktek pemalsuan kutipan akta nikah atas nama KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Hal ini dapat dibuktikan melalui grafik jumlah penduduk yang berpendidikan 55% sampai jenjang SD, 25% sampai jenjang SMP, 15% sampai jenjang SMA dan 5% Strata Satu (S-1).

Factor penyebab lain adalah kurang adanya kesadaran hukum dan sosialisasi tentang pencatatan nikah yang resmi dan legal menurut UU Perkawinan melalui prosedur yang ditetapkan Departemen Agama kepada lapisan masyarakat. Terutama proses pencatatan pernikahan di KUA. Para pelaku juga sengaja mencari keamanan di masyarakat, sehingga ketika diperiksa, pemesan kutipan akta nikah palsu dapat menunjukkan kutipan akta nikah yang diperoleh sesuai dengan yang asli.

Fakta lain yang terungkap adalah adanya moral sebagian masyarakat Kabupaten Jombang cenderung untuk melakukan tindakan

kriminal. Berbagai kasus tindakan “kawin lari” yang dilakukan oleh pasangan belum menikah. Terkadang tindakan ini disebabkan oleh tidak adanya restu dari kedua orang tua calon mempelai pengantin.

2. Proses Memperoleh Akta Nikah Palsu

Sesuai dengan hasil penelitian, praktek tersebut dapat diidentifikasi dari adanya kutipan akta nikah palsu di Kecamatan Ploso dengan menggunakan nama KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Hal ini dibuktikan oleh peneliti yang telah menemui salah seorang pelaku pencatat kutipan akta nikah palsu yang mengatasnamakan KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Peneliti telah melakukan *interview* dengan yang bersangkutan.

Peneliti bertemu secara langsung, bertatap muka (*face to face*) dan seolah-olah melakukan transaksi dengan pihak pelaku pencatat kutipan akta nikah palsu. Setelah terjadi transaksi, kemudian peneliti memotong perbincangan karena data tentang proses mendapatkan kutipan akta nikah palsu telah dianggap cukup. Pihak pelaku pencatat kutipan akta nikah palsu pun tidak begitu banyak komentar. Berdasarkan beberapa keterangan pelaku pencatat kutipan akta nikah palsu, peneliti dapat mengetahui tentang beberapa hal yang berhubungan dengan proses mendapatkan kutipan akta nikah palsu.¹¹

Praktek pencatatan kutipan akta nikah palsu dilakukan oleh tiga orang sebagai *partner* sindikat pelaku. Salah satunya adalah mantan pegawai KUA di wilayah Departemen Agama Kabupaten Jombang yang sudah pensiun. Proses pencatatan kutipan akta nikah palsu kadang menggunakan akad nikah dan kadang juga tanpa menggunakan akad nikah. Pemesan kutipan akta nikah palsu yang menggunakan akad nikah dipersilahkan mengajak saksi keluarga yang bersangkutan untuk menyaksikan prosesi akad nikah.

Proses memperoleh kutipan akta nikah palsu selesai dalam jangka waktu empat hari. Pemesanan dapat dilakukan melalui telepon atau datang ke rumah seorang calo atau langsung datang ke rumah oknum pencatat kutipan akta nikah palsu untuk mengadakan transaksi pemesanan kutipan akta nikah sesuai dengan nominal harga yang ditawarkan oleh pelaku pencatat kutipan akta nikah kepada pemesan dengan melalui beberapa persyaratan yang telah

¹¹ Hasil wawancara dengan Ahmad (nama samaran), salah satu pemesan kutipan akta nikah palsu, tanggal 8 Juni 2005, pukul 10.35 wib.

ditentukan. Jika telah mencapai kesepakatan antara pelaku pencatat kutipan akta nikah palsu, lalu keduanya menentukan waktu dan tempat serah terima kutipan akta nikah dilaksanakan.

Persyaratan memperoleh kutipan akta nikah palsu hampir sama dengan prosedur memperoleh akta nikah asli.¹² Pemesan harus menyetorkan *foto copy* Kartu Tanda Penduduk calon suami isteri, menyerahkan foto ukuran 3x4 berwarna atau hitam putih masing-masing sebanyak dua lembar, membayar uang transaksi sebanyak Rp 350.000 untuk tanpa akad nikah atau Rp. 400.000, jika disertai akad nikah. Proses pembayaran ini tidak dapat ditunda. Pengambilan kutipan akta nikah palsu harus tepat waktu sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati.

Kutipan akta nikah palsu memiliki ciri-ciri tersendiri jika dibandingkan dengan akta nikah asli.¹³ Nomor registrasi kutipan akta nikah palsu tidak sesuai pada KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Nomor registrasi kutipan akta nikah palsu terlalu banyak dari ukuran normalnya tidak sesuai dengan yang terdaftar di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Nama yang bersangkutan (suami isteri) tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Nama kepala KUA atau PPN Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang yang tertulis pada kutipan akta nikah palsu tidak sesuai dengan nama kepala yang bertugas pada saat itu.

Ciri lain adalah tanggal lahir tidak ditulis secara lengkap, namun hanya tempat dan tahunnya yang disertakan dalam kutipan akta nikah palsu. Nomor porporasi dan kode kutipan akta nikah tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.

Pembahasan

1. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah

Akta nikah adalah akta perkawinan sebagai bukti keabsahan perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor

¹² Hasil wawancara dengan Abu Bakar (nama samaran), salah satu pemesan kutipan akta nikah palsu, tanggal 9 Juni 2005, pukul 11.17 wib.

¹³ Penulis peroleh dengan membandingkan antara kutipan akta nikah palsu dengan kutipan akta nikah asli yang selama ini diketahui atas nama KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.

1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan buku nikah adalah kutipan akta nikah yang ditandatangani oleh Penghulu.¹⁴

Akta nikah dibuat dalam rangkap 2 (dua). Helai pertama disimpan oleh PPN, helai kedua disimpan pada Panitera PA dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.¹⁵

Akta nikah itu memuat, (1) nama, tanggal dan tempat tanggal lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri, (2) jika salah seorang atau keduanya pernah menikah, disebutkan pula nama isteri atau suami terdahulu, (3) nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka, (4) ijin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Perkawinan, (5) dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, (6) ijin dari pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 UU Perkawinan, (7) persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, (8) ijin dari pejabat sebagai yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan bagi anggota TNI-Polri, (9) perjanjian perkawinan apabila ada, (10) nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam, (11) nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah Bab XV pasal 36, spesifikasi buku nikah meliputi beberapa hal. Pertama, buku nikah dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris.

Kedua, buku nikah berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 17,50 cm dan lebar 12,50 cm, margin atas dan bawah 0,50 cm, margin kanan dan kiri 0,50 cm dan margin tengah 0,50 cm, dihitung dari garis bingkai bagian luar, sampul muka terdiri dari lambang garuda yang diletakkan di tengah-tengah, di atas lambang garuda tertulis Buku Nikah Suami atau Buku Nikah Isteri dan di bawahnya tertulis Departemen Agama Republik Indonesia. Bagian dalam terdiri dari 10 kolom yang masing-masing kolom dibatasi oleh batas pinggir atau bingkai sehingga masing-masing bagian berukuran

¹⁴ Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 92.

7,40 cm x 10,80 cm dan 7,00 cm x 10,80 cm. Kolom pertama berisi nasehat untuk kedua mempelai, Basmalah, QS. al-Nisa': 19, tanda tangan Menteri Agama RI. Kolom kedua berisi Republik Indonesia, kutipan akta nikah; KUA, Kecamatan, Perwakilan RI, Kabupaten/ Kota, Provinsi, pas foto isteri sebelah kiri, ukuran foto masing-masing 2x3 cm. Kolom ketiga berisi seri, nomor, hari, tanggal, bulan, tahun, bertepatan dan pukul dilangsungkannya akad nkah, identitas mempelai laki-laki.

Kolom keempat berisi identitas mempelai wanita dan identitas wali. Kolom kelima berisi mas kawin, kecamatan, perwakilan RI dan penghulu. Kolom keenam berisi catatan status perkawinan. Kolom ketujuh berisi *shigat ta'liq*. Kolom kedelapan dan kesembilan merupakan tanda terima buku nikah yang ditinggal pada KUA Kecamatan yang bersangkutan. Kolom sepuluh berisi doa sesudah akad nikah.

Ketiga, buku nikah menggunakan pengaman berupa (1) nomor porporasi dengan angka sebanyak 7 digit dan seri dengan huruf, (2) laminating pada lembar yang tertera foto suami isteri, (3) lambang garuda pada masing-masing kolom dengan menggunakan *invisible ink* dicantumkan di tengah-tengah kolom dengan ukuran margin atas 2.80 cm, margin bawah 2.80 cm, margin kanan dan kiri masing-masing 1,20 cm dan bertuliskan Departemen Agama RI dengan warna samar-samar coklat muda, (4) menggunakan hologram pada *cover* dalam dengan tulisan Menteri Agama Republik Indonesia dengan melingkari burung garuda, (5) buku nikah menggunakan bahan kertas sekuriti.

2. Prosedur Pendaftaran Kehendak Nikah

Sebelum melangsungkan pernikahan, calon mempelai pria dan wanita harus mengikuti beberapa prosedur.¹⁶ Pertama, setiap penduduk yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, baik secara lisan atau tertulis, oleh calon pengantin atau oleh orang tua atau wakilnya dengan membawa beberapa persyaratan administrasi pendaftaran nikah. Kedua, pemberitahuan tersebut memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman calon pengantin

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ilham Rohim, Kepala KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, tanggal 9 Juni 2005, pukul 09.34 wib.

dan jika salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

Ketiga, pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Keempat, pengecualian terhadap jangka waktu tersebut, disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati. Kelima, PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti syarat-syarat perkawinan, tentang terpenuhi atau belum berdasarkan ketentuan UU Perkawinan.

Keenam, jika setelah diperiksa ternyata persyaratan pemberitahuan kehendak nikah sudah lengkap dan tidak ada sesuatu halangan perkawinan, kemudian hasil penelitian tersebut ditulis oleh PPN dalam sebuah daftar pencatatan nikah. Ketujuh, PPN nikah menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan yang telah ditandatangani oleh PPN nikah dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir pada tempat yang sudah ditentukan pada KUA dan mudah dibaca, yang memuat (1) nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman calon pengantin dan dari orang tua calon pengantin, jika salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri atau suaminya terdahulu, (2) hari, tanggal, jam dan tempat akad nikah dilangsungkan, biasanya akad nikah berada di rumah calon pengantin wanita.

3. Faktor Penyebab Akta Nikah Palsu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kutipan akta nikah palsu dengan menggunakan nama KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang disebabkan adanya kesulitan untuk memperoleh ijin dari pihak isteri pertama dan keluarga, untuk melakukan poligami yang sesuai dengan prosedur PA Kabupaten Jombang. Proses ini harus disertai menyatakan jumlah penghasilan per bulannya, mendatangkan saksi dan alasan yang kuat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh suami dengan alasan poligami liar, suami ingin perbuatannya tidak diketahui oleh isteri dan keluarganya, karena begitu sulitnya proses memperoleh ijin poligami melalui Pengadilan Agama setempat.

Fakta ini juga disebabkan karena suami beranggapan bahwa tidak akan tercapai keinginannya berpoligami jika melalui ijin

poligami dari PA. Akhirnya dengan alasan inilah pihak suami memesan kutipan akta nikah palsu.¹⁷

Karena tidak adanya persetujuan dari pihak orang tua pemesan kutipan akta nikah palsu, pemohon mengambil jalan pintas berupa tindakan kawin lari yang dilakukan oleh pasangan belum menikah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keamanan di masyarakat. Sehingga ketika diperiksa oleh pejabat kelurahan, pasangan tersebut yang menggunakan kutipan akta nikah palsu dapat menunjukkan kutipan akta nikah yang diperoleh sesuai dengan yang asli.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, faktor dominan yang berpengaruh pada pemalsuan akta nikah di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang banyak sekali. Faktor poligami liar yang dilakukan oleh para suami yang akan menikah lagi. Poligami liar dilakukan karena prosedur PA tentang ijin berpoligami sulit dilakukan dan jika dilakukan menimbulkan tanggung jawab yang sangat berat. Prosedur perijinan yang ditetapkan oleh PA sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: *Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*

Pasal di atas menegaskan bahwa seorang suami diijinkan untuk berpoligami jika mampu memenuhi persyaratan yang sesuai dengan UU Perkawinan. Seorang suami diperbolehkan melakukan poligami dengan mendapatkan ijin dari PA dengan alasan, berdasarkan Pasal 4 UU Perkawinan, jika (1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (2) isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, untuk dapat mengajukan permohonan pada PA harus memenuhi syarat-syarat, (1) adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri, (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, (3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

¹⁷ Hasil observasi tanggal 6 Juni 2005.

Penjelasan persyaratan tersebut di atas terlihat rumit prosedur untuk berpoligami, meskipun Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pasal ini tidak berarti memudahkan poligami bagi seorang suami. Hal ini disebabkan prosedur poligami ini juga diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Pasal 40 dalam PP tersebut menyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Pada Pasal 41 menerangkan bahwa Pengadilan kemudian memeriksa mengenai (1) ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, yaitu bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan, (2) ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan, (3) ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, surat keterangan pajak penghasilan, surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan, (4) ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Berdasarkan prosedur di atas, seorang suami akan merasa kesulitan ketika akan berpoligami. Para suami memilih jalan memalsukan akta nikah ketika hendak menikah dengan perempuan lain. Hal ini merupakan jalan yang paling mudah dan efisien untuk melakukan poligami (liar).

Fakta ini juga dialami bagi anggota PNI/Polri yang masih dalam masa pendidikan ataupun PNS. Hal ini bisa dilihat pada Peraturan

Pemerintah Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Nomor 10 Tahun 1983. Pada Pasal 4, berisi lima ayat, yaitu (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat,¹⁸ (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diijinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri, (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat, (4) permintaan di sini sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis, (5) dalam surat permintaan ijin, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan ijin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah di atas, yang dapat dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, yaitu pegawai bulanan di samping pensiun, pegawai Bank Milik Negara, pegawai BUMN, pegawai Bank Milik Daerah dan pegawai BUMD, kepala desa, perangkat desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa perijinan poligami bagi PNS dan pegawai sebagaimana disebut di atas adalah sama dalam hal melakukan ijin poligami. Oleh karena itu, sulitnya prosedur di atas memperbesar potensi poligami liar dengan cara memesan kutipan akta nikah palsu.

Di samping faktor dominan di atas, masih juga terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya kutipan akta nikah palsu. Sebagaimana diketahui kondisi sosial masyarakat Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang yang berjumlah sekitar 37.078 orang, masih berpendidikan rendah lulusan SD. Permasalahan ini juga dilatarbelakangi oleh kurang adanya sosialisasi secara formal oleh pihak KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, melihat faktor di atas, tidak sepenuhnya menjadi kesalahan dari penduduk Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, hanya saja sistem dan kondisi sosial yang harus diperbaiki secara bertahap dan maksimal dari semua pihak.

¹⁸ Yang dimaksud Pejabat di sini adalah menteri, jaksa agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah non-Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur, Pimpinan Bank Milik Negara, Pimpinan BUMN, Pimpinan Bank Milik Daerah atau Pimpinan BUMD.

4. Proses Memperoleh Akta Nikah Palsu

Peredaran kutipan akta nikah palsu yang terjadi di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang disebabkan oleh mudahnya prosedur dan proses mendapatkan kutipan akta nikah palsu. Dari prosedur dan proses yang mudah ini masyarakat Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang lebih memilih memesan kutipan akta nikah palsu daripada harus mengurus akta nikah asli dengan prosedur birokrasi yang menyulitkan. Meskipun secara jelas perbuatan ini merupakan tindakan melanggar hukum dan termasuk dalam kategori tindakan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, pelaku tindakan ini akan mendapatkan sanksi bagi pihak yang melakukan pencatatan perkawinan di luar KUA.¹⁹

Pertama adalah sanksi berupa denda. Sanksi ini diberikan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan tidak dihadapan PPN yang berwenang, bagi mereka yang beristeri lebih dari seorang tanpa ijin PA, bagi PPN yang melangsungkan pernikahan atau mencatat perkawinan dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau bagi PPN yang melakukan pencatatan pernikahan suami yang beristeri lebih dari satu tanpa ijin PA.

Kedua adalah sanksi berupa pidana kurungan. Masa kurungan selama-lamanya tiga bulan diberikan bagi PPN yang melangsungkan pernikahan atau mencatat perkawinan dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bagi PPN yang melakukan pencatatan pernikahan suami yang beristeri lebih dari satu tanpa ijin PA.

Ketiga adalah hukuman jabatan. Sanksi ini berupa penurunan pangkat dan golongan pelaku, penundaan kenaikan gaji berkala ataupun diberhentikan dari jabatan, baik dengan terhormat ataupun dengan tidak terhormat.

Pelanggaran terhadap pemalsuan akta nikah tidak dibenarkan dan pernikahannya dianggap tidak sah menurut hukum, karena melalui proses yang tidak prosedural dan tidak sesuai dengan prosedur pencatatan nikah yang ditetapkan Departemen Agama. Prosedur yang ditetapkan oleh Departemen Agama adalah (1) pemberitahuan kehendak nikah pada KUA Kecamatan Ploso Kabupaten

¹⁹ Sesuai dengan Bab VI Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Jombang, (2) pemeriksaaan nikah pada KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.

Sebagaimana dijelaskan di atas, pemalsuan kutipan akta nikah juga dianggap sebagai tindakan pidana dan mengarah kepada tindakan kriminal. Hal ini sesuai dengan Pasal 263 (1) KUHP Bab XII yang berbunyi *Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun*. Pada ayat (2) berbunyi *Barang siapa yang dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*. Pasal 264 (1) menyatakan bahwa *Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap (1) akta-akta otentik, (2) surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagaiannya ataupun dari suatu lembaga umum, (3) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai, (4) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, (5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan*.

5. Tinjauan Hukum Islam

Tindakan melanggar hukum yang berupa pemalsuan kutipan akta nikah secara tegas dilarang oleh agama Islam, karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau UU Perkawinan. Dalam hal ini, pemerintah dikategorikan sebagai *ulil amri* yang perintah dan peraturannya harus dipatuhi dan dilaksanakan selama perintah atau peraturan tersebut tidak melanggar hukum Islam. Hal ini sudah dijelaskan dalam QS. al-Nisa': 59.

Ayat tersebut memerintahkan kepada umat Islam agar patuh terhadap perintah seorang pemimpin negara, seperti yang tertera pada lafadz *ulil amri*. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah pemerintahan suatu negara, karena keputusan pemerintah itu harus diikuti karena berada pada suatu negara yang memiliki aturan yang harus diikuti. Oleh karena itu, pencatatan kutipan akta

nikah yang menjadi wewenang KUA setempat merupakan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan telah diundangkan dalam UU Perkawinan.

Mengingat UU Perkawinan tersebut merupakan peraturan pemerintah, maka setiap warga negara Indonesia, khususnya yang beragama Islam, wajib mematuhi peraturan tersebut sesuai dengan QS. an-Ni': 59 sebagaimana di atas. Perintah wajib tersebut dibuktikan melalui lafadz *athi'u* terdiri dari *fi'il amar*, sehingga menunjukkan arti wajib.

Peraturan Pemerintah tentang pencatatan nikah di KUA bertujuan demi kemaslahatan umat. Perintah tersebut untuk menghindari adanya penipuan dari salah satu pihak mempelai pengantin. Fakta yang terjadi selama ini adalah adanya penyelewengan dari pihak suami terhadap isteri yang melakukan poligami tanpa ijin isteri pertama, dengan cara nikah *sirri*, bahkan seorang suami bisa meninggalkan isterinya kapan saja dan di mana saja, karena status suami tidak diketahui apakah sudah beristeri atau belum.

Oleh karena itu, perlu adanya pencatatan nikah di KUA. Pencatatan nikah ini memberikan kemaslahatan (kebaikan) kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya untuk menghindari adanya *ke-mafsadat-an* (kerusakan).²⁰ Hal ini sesuai dengan *qa'idah fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik kebaikan.

Perkawinan yang menggunakan kutipan akta nikah palsu biasanya menggunakan wali hakim, padahal wali yang sebenarnya dari pihak calon mempelai pengantin wanita masih ada (*wali nasab*), namun dinafikan. Perbuatan mengambil alih posisi wali tersebut tidak dibenarkan menurut hukum Islam, karena yang berhak menikahkan adalah wali dari pihak calon mempelai wanita yang sebenarnya. Di Indonesia, yang diikuti adalah urutan para wali menurut madzhab Syafi'i yang urutan tersebut didasarkan pada *ashabah*.²¹ Urutan tersebut adalah (1) bapak, kakek dan seterusnya

²⁰ Abdul Hamid Hakim, *al-Sullam*, Juz II (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), 60.

²¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 101.

ke atas, (2) saudara laki-laki sekandung atau seibu-sebapak, (3) saudara laki-laki sebapak, (4) anak dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah, (5) anak dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya ke bawah, (6) paman dari bapak yang sekandung, (7) paman dari bapak yang sebapak, (8) anak laki-laki dari paman sekandung, (9) anak laki-laki dari paman sebapak.

Jika kesembilan wali nikah di atas tidak ada, maka yang menjadi wali adalah *sulthan* atau *hakim*, yang disebut dengan istilah wali hakim. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw berikut ini:

قال رسول الله ص م، السلطان ولي من لا ولي له (رواه أبو داود والترميدى وابن ماجه)

Artinya: Sabda Rasulullah Saw; sultan adalah wali orang yang tidak berwali. (HR. Abu Daud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Wali nikah yang utama adalah bapak. Jika bapak tidak ada, maka kakek menjadi wali. Jika kakek tidak ada, maka yang menjadi wali adalah saudara laki-laki seibu sebapak (kandung). Demikian juga seterusnya sampai ke bawah.

Dari wali nikah tersebut di atas, yang lebih diutamakan itu disebut dengan wali dekat (*wali aqrab*) dan wali nikah yang lain disebut wali jauh (*wali ab'ad*). Contohnya adalah wali nikah yang diutamakan adalah saudara laki-laki sebapak, sedangkan wali-wali nikah yang lain disebut dengan *wali ab'ad*.

Hakim, sebagaimana disebut dalam hadits di atas, adalah seseorang yang diutus oleh presiden, dalam hal ini adalah menteri agama, kemudian diwakilkan kepada kepala KUA untuk melaksanakan tugas sebagai hakim dalam menangani masalah pernikahan. Hakim yang menikahkan dengan menggunakan kutipan akta nikah palsu bukan hakim yang mendapatkan mandat dari presiden, tetapi hakim yang ditunjuk dari pihak pencatat atau pembuat kutipan akta nikah palsu. Menurut hukum Islam, pernikahan tersebut dihukumi tidak sah, karena tidak sesuai dengan urutan perwalian dalam Islam.

6. Implikasi Akta Nikah Palsu

Tindakan pemalsuan kutipan akta nikah memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap pihak-pihak dan instansi. Per-

tama adalah bagi pihak isteri pertama. Dalam kasus poligami, ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini isteri pertama menjadi korban atas tindakan suami yang telah melakukan poligami secara liar tanpa ijin isteri pertama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan. Padahal, berdasar Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan, untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada PA, harus dipenuhi syarat (a) adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri, (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.²²

Kedua adalah menyangkut KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, yang tidak memperoleh laporan tertulis dari pihak pemohon kutipan akta nikah palsu dengan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama. Dengan kasus ini, KUA Ploso Kabupaten Jombang merasa dilecehkan karena kutipan akta nikah palsu tersebut atas nama KUA Kecamatan Ploso. Hal ini secara jelas telah mencoreng nama baik dari KUA Kecamatan Ploso, di samping itu juga telah dirugikan secara materiil yang seharusnya memperoleh pemasukan sebesar 60% dari dana pendaftaran nikah digunakan untuk menunjang program kegiatan KUA.

Ketiga adalah terkait dengan Kantor Departemen Agama Republik Indonesia. Dalam kasus ini, Departemen Agama Republik Indonesia telah diambil alih hak ciptanya dan tidak memperoleh pemasukan biaya pencatatan nikah yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN di Lingkungan Departemen Agama. Di samping itu, Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang telah dirugikan sebesar 25% dari jumlah pencatatan nikah, Kantor Departemen Agama Wilayah Propinsi Jawa Timur juga telah dirugikan sebesar 15% dari jumlah pencatatan nikah.

Keempat adalah Pemerintah Kabupaten. Pencatatan akta nikah di KUA memberikan *income* (pemasukan) tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten, sehingga jika terdapat ada kutipan akta nikah palsu, maka secara otomatis mengurangi *income* Pemerintah Kabupaten.

²² Baca Pasal 5 Ayat (1) UU Perkawinan.

Kerugian ini dapat dibuktikan melalui Pasal 2 Keputusan Bupati Jombang Tentang Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk yang menyatakan bahwa *khusus terhadap komponen biaya pencatatan nikah dan rujuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 yang diperuntukkan bagi dana sosial, pendidikan dan keagamaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.*

Kelima adalah menyangkut kepentingan negara Republik Indonesia. Tindakan pemalsuan kutipan akta nikah telah merugikan pendapatan bagi negara Republik Indonesia, mengingat dalam hal ini negara tidak memperoleh *income* melalui biaya pendaftaran nikah di KUA kecamatan setempat.

Keenam menyangkut kepentingan pemerintahan desa atau kelurahan. Pihak aparat desa tidak memperoleh laporan adanya pernikahan penduduknya melalui pemberitahuan nikah (model N-1). Padahal itu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi ketika mendaftarkan nikah di KUA, sehingga nantinya desa mengetahui seberapa banyak penduduknya yang sudah menikah. Maka ketika terjadi pemalsuan kutipan akta nikah, pihak desa merasa dirugikan, sebab tanpa sepengetahuannya wilayah yang menjadi kekuasaan telah diambil oleh oknum pembuat atau pencatat kutipan akta nikah palsu.

Ketujuh adalah menyangkut status anak. Pernikahan yang menggunakan kutipan akta nikah palsu dianggap tidak sah menurut UU Perkawinan, karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Dengan adanya pernikahan yang tidak dicatat di KUA, maka status pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara hukum dan akibat dari pernikahan tersebut, anak dianggap tidak sah pula, sehingga seorang anak tidak bisa memperoleh akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil, mengingat asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik dan dikeluarkan oleh pejabat berwenang.²³

Kedelapan adalah menyangkut hak waris mewaris. Hilangnya hak waris mewaris karena tidak ada pengakuan status secara hukum yang sah, sebab tidak tercatat di KUA, sehingga tidak tercatat pula di PA. Ketika anak dari hasil pernikahan menggunakan kutipan akta nikah palsu tersebut mengurus permohonan hak waris ke

²³ Baca Bab XII Bagian Pertama Ayat (1) UU Perkawinan.

PA setempat, tetap tidak bisa menuntut hak tersebut dikarenakan kutipan akta nikah kedua orang tuanya palsu.

Kesembilan adalah terkait dengan perwalian anak. Hilangnya hak perwalian yang diakibatkan dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum, sebab tidak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan bahwa kejahatan yang berupa adanya akta nikah palsu disebabkan faktor dominan dan faktor lain yang mempengaruhi. Faktor dominan tersebut antara lain adanya poligami liar atau tidak sehat, adanya peraturan yang melarang pernikahan bagi anggota TNI/Polri yang masih dalam tahap pendidikan, adanya peraturan ketat yang memperbolehkan poligami bagi PNS tetapi harus melalui ijin dari pejabat serta mencantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan ijin untuk beristeri lebih dari satu.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya akta nikah palsu antara lain faktor rendahnya pendidikan penduduk Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, kurang adanya kesadaran hukum dan sosialisasi tentang pencatatan nikah yang resmi dan legal menurut UU Perkawinan melalui prosedur yang ditetapkan Departemen Agama Republik Indonesia pada lapisan masyarakat.

Para pelaku juga mencari keamanan di masyarakat, sehingga saat diperiksa, pemohon kutipan akta nikah palsu tetap dapat menunjukkan kutipan akta nikah yang diperoleh sesuai dengan aslinya. Moral sebagian masyarakat kecamatan Ploso Kabupaten Jombang yang masih rendah dan berakibat melakukan tindakan kriminal. Adanya tindakan kawin lari yang dilakukan oleh pasangan yang belum nikah. Kondisi ini semakin diperparah karena proses mendapatkan kutipan akta nikah palsu sangat mudah, baik melalui telepon, memesan atau datang langsung ke rumah calo atau pencatat kutipan akta nikah palsu tersebut.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag RI, 2000.
- Abu Bakar (nama samaran), salah satu pemesan kutipan akta nikah palsu, wawancara pribadi, tanggal 9 Juni 2005, pukul 11.17 wib.
- Ahmad (nama samaran), salah satu pemesan kutipan akta nikah palsu, wawancara pribadi, tanggal 8 Juni 2005, pukul 10.35 wib.
- Buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- Daftar Laporan Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2005.
- Data Jumlah Nikah, Talak dan Rujuk KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2004.
- Grafik Kepadatan Penduduk di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2005.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hakim, Abdul Hamid. *al-Sullam*, Juz II. Surabaya: Al-Hidayah, 1998.
- Ilham Rohim, Kepala KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, wawancara pribadi, tanggal 9 Juni 2005, pukul 09.34 wib.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Observasi tanggal 6 Juni 2005.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.